

# BAB I

## PENDALUHUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan terutama dari sektor perdagangan. Segala bentuk kegiatan perdagangan pun memiliki aturan dalam perundang-undangan tersendiri, mulai dari batasan-batasan apa saja yang boleh diperdagangkan hingga tindak-tanduk produsen sebagai pelaku usaha. Hal ini mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI 1945) Pasal 1 ayat (3) yakni “negara indonesia adalah negara hukum”.

Selain sebagai negara hukum, terdapat pula dalam UUD NKRI 1945 Pasal 29 ayat (1) bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat (2) bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Ketentuan tersebut tentunya mengandung arti bahwa secara konstitusi negara berkewajiban melindungi rakyat Indonesia dalam menjalankan ajaran agama masing-masing yang sudah menjadi hak asasi bagi setiap umat.

Berdasarkan teori Friedrich Julius Stahl, Hazairin dan Tahir Azhary mengemukakan teori “lingkaran kesentris” yang menunjukkan betapa eratnya hubungan antara agama, hukum dan negara.<sup>1)</sup> Oleh karena itu dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, tentu hal tersebut dapat dijadikan prospek penting didalam pembangunan hukum di Indonesia.

---

<sup>1)</sup>Friedrich Julius Stahl, Hazairin dan Tahir Azhary dalam Ichtijanto SA, *Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia* Sebagaimana dikutip dari Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 178



Islam sebagai agama yang dipeluk mayoritas penduduk Indonesia, tentu berpengaruh terhadap pola hidup bangsa Indonesia. Perilaku pemeluknya tidak lepas dari syariat yang dikandung agamanya. Melaksanakan syariat agama yang berupa hukum-hukum menjadi salah satu parameter ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya. Sebagai tuntunan Allah SWT yang diantaranya berupa hukum-hukum Islam telah disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW dan terinci dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>2)</sup>

Ada beberapa patokan *hukum* atau kaidah di dalam Islam untuk mencegah perbuatan manusia yang dibenarkan maupun yang dilarang. Lima kaidah itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram<sup>3)</sup>. Kelima patokan tersebut harus dijalankan manusia sebagai umat muslim.

Dengan menjalankan kaidah tersebut, sehingga dalam melaksanakan aturan perundang-undangan Indonesia sebaiknya sejalan dengan aturan di dalam hukum Islam. Sebagaimana pernyataan the founding father RI, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan negara hukum Republik Indonesia, syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga orang Islam mempunyai sistem syariat yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia<sup>4)</sup>.

Untuk membatasi perilaku pelaku usaha dalam lingkup perdagangan, pemerintah Indonesia melalui proses legislasi telah membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat menjadi UUPK yang telah diberlakukan atau diundangkan sejak 20 April 1999. Pembatasan perilaku pelaku usaha ini tidak semena-mena untuk membatasi kreatifitas pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasanya, namun lebih kepada membatasi tindakan kesewenang-wenangan

---

<sup>2)</sup> Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia*, STIH IBLAM, Surabaya, 2004, hlm 9

<sup>3)</sup> Muchsin, *Fiqh Islam*, sinar baru Algesindo, 2000, Cet.34, hlm 1

<sup>4)</sup> Ichijanto SA, *opcit*



pelaku usaha terhadap konsumen. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka (1) yakni “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pada perkembangannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disingkat UUPK, dirasa masih kurang cukup untuk melindungi hak-hak dari konsumen muslim jika hanya berpatokan dari undang-undang saja. Diperlukan adanya aturan hukum khusus apabila menyangkut hal-hal yang khusus pula. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk muslim yang memiliki aturan hukum khusus yakni hukum Islam yang tidak dapat diabaikan. Pengkhususan penduduk muslim dalam hukum perlindungan konsumen dikarenakan menyangkut beberapa hal yang berkaitan dengan agama. Negara Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali.<sup>5)</sup>

Sehingga tidak hanya didalam UUPK dan Undang-undang Pangan yang mengatur suatu produk, namun juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang disahkan pada 17 Oktober 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana lebih khusus mengatur produk bagi perlindungan umat Islam. Didalam undang-undang tersebut pada Pasal 4 menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Produsen yang hendak mencantumkan label halal pada produknya harus mendapat keputusan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan rekomendasi dari LPPOM MUI. Pada label dapat dituliskan nomor sertifikat yang telah dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Lembaga Pengkajian Obat-obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>5)</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 2



(selanjutnya disingkat LPPOM MUI) adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Dengan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI sangat berpengaruh terhadap produksi suatu perusahaan baik itu makanan, minuman, obat bahkan kosmetik akan memberikan kepercayaan tersendiri kepada masyarakat yang akan menjadi konsumen. Masyarakat khususnya yang beragama Islam akan menjadi tenang dikala sudah mengetahui kehalalan suatu produk perusahaan. Tidak semua laporan yang diberikan LPPOM MUI langsung disepakati oleh Komisi Fatwa MUI. Terkadang, terjadi penolakan karena dianggap belum memenuhi persyaratan. Dalam kerjanya bisa dianalogikan bahwa LPPOM MUI adalah jaks yang membawa kasus ke pengadilan dan MUI adalah hakim yang memutuskan keputusan hukumnya.<sup>6)</sup>

Adapun pengaturan mengenai kewajiban sebuah perusahaan mencantumkan label halal jika produk tersebut halal, sebelum mengedarkan produknya kepada masyarakat luas yakni dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kewajiban paling tidak mencantumkan label halal terdapat pada Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.
2. Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut.

---

<sup>6)</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI), diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 09.32



Pada pasal diatas menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang memproduksi makanan diwajibkan untuk mencantumkan label halal dan wajib pula untuk mempertanggungjawabkan label halal tersebut, sehingga dapat dikatakan perusahaan tidak dapat semena-mena dalam mengklaim kehalalan produknya.

Salah satu kiat perusahaan dalam memberikan jaminan kehalalan produknya selama kurun waktu sertifikasi yakni dengan menerjunkan Auditor Halal Internal (selanjutnya disingkat AHI) yang ditempatkan di setiap perusahaan yang mendapat sertifikasi halal. Proses penjaminan yang dilakukan dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System*) di dalam perusahaan.<sup>7)</sup> Setiap perusahaan yang memiliki sertifikat halal harus pula memiliki AHI. Dengan kata lain bahwa keberadaan AHI merupakan salah satu syarat untuk suatu perusahaan mendapat sertifikasi halal.

AHI adalah orang yang ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan. Kehadiran AHI menjamin kehalalan setiap produk perusahaan dalam kurun waktu tertentu secara berkala sehingga label sertifikasi halal yang berlaku selama dua tahun dapat terjamin. Sesuai ketentuan MUI, masa berlaku Sertifikat Halal adalah dua tahun.

Selama masa tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada MUI dan konsumen Muslim bahwa perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya.<sup>8)</sup> Kegiatan pengawasan AHI dilakukan demi terjaminnya kehalalan produk selama kurun waktu 2 tahun yang tentunya kehalalan produk tidak dapat diawasi pihak

---

<sup>7)</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM\\_MUI](https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI), diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 09.32 WIB

<sup>8)</sup> LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*, LPPOM-MUI, Jakarta, 2008, hlm 7



LPPOM-MUI terus menerus.

Peran AHI ini tentu sangat teramat penting, sebab tidak semua produk yang telah disertifikasi halal oleh LPPOM-MUI dapat terus-terusan terjamin kehalalan apabila tidak ada seorang pihak yang dapat memantau produk makanan dalam setiap produksinya. Hasil audit yang dilakukan oleh AHI disampaikan ke pihak LPPOM-MUI setiap 6 (enam) bulan sekali. Selain itu dengan adanya AHI dapat terlaksananya upaya menegakkan Undang-undang perlindungan konsumen dan Undang-undang Jaminan produk halal.

Namun yang menjadi permasalahannya, bagaimana bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban AHI tersebut. Hal ini menjadi permasalahan karena peran AHI ini berasal dari perusahaan itu sendiri. Pengangkatan seorang AHI adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diberikan sertifikasi halal oleh MUI.

Dengan diangkatnya AHI oleh perusahaan bersangkutan dapat dikatakan bahwa peran AHI tersebut dapat diragukan kredibilitasnya karena berasal dari perusahaan yang bersangkutan. Sifat independen yang dimiliki oleh AHI tersebut dapat dipertanyakan dikala berasal dari perusahaan serta digaji oleh perusahaan itu juga.

Di Kota Padang sendiri sudah banyak perusahaan yang mendapat sertifikasi halal. Hal ini sudah menjadi kewajiban tersendiri karena kota Padang merupakan kota yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Sehingga perusahaan yang mendapat sertifikasi tersebut diwajibkan memiliki AHI.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah ini menimbulkan minat dan keinginan bagi penulis untuk membahas dan menuangkannya dalam karya ilmiah yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Oleh Auditor Halal Internal (AHI) Terhadap Sertifikasi Halal Produk Makanan Oleh LPPOM-MUI Sumbar Di Kota Padang Berdasarkan Perlindungan Konsumen Dan Jaminan**



**Produk Halal”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal (AHI) terhadap sertifikasi halal produk makanan oleh LPPOM-MUI Sumbar di Kota Padang
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Jaminan Produk Halal
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Auditor Halal Internal terhadap pengawasan yang dilakukannya kepada LPPOM-MUI Sumbar

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal (AHI) terhadap sertifikasi halal produk makanan oleh LPPOM-MUI Sumbar di Kota Padang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Auditor Halal Internal berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Jaminan Produk Halal
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Auditor Halal Internal terhadap pengawasan yang dilakukannya kepada LPPOM-MUI Sumbar

## **D. Manfaat penelitian**



Penelitian ini diharapkan bermanfaat bukan hanya bagi penulis saja, namun juga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan data maupun pengetahuan yang berkaitan dengan materi penelitian ini:

1. Secara Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas pikiran penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan terutama memantapkan cakrawala berpikir penulis dibidang hukum perdata.
- b. Untuk pengetahuan dibidang hukum serta dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan dalam perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran demi menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dan memberikan manfaat bagi semua praktisi hukum terkait dengan masalah perlindungan konsumen, yang mana hak konsumen kerap kali tidak diperhatikan dengan baik terkait dalam hal pengawasan sertifikasi halal terhadap produk makanan.
- b. Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah mengenai perlindungan konsumen terutama terhadap pengawasan kehalalan produk makanan di Indonesia.
- c. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang pengawasan produk makanan di perusahaan-perusahaan.

**E. Metode Penelitian**



Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris (*Empiris Research*) yang menekankan pada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

### 2. Sifat penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, gejala sosial yang dimaksud adalah menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan produk makanan oleh Auditor Halal Internal yang telah dikeluarkan sertifikasi halal oleh LPPOM-MUI SUMBAR di Kota Padang

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan oleh auditor halal internal terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM-MUI Sumbar yakni pihak AA Catering, Anabundo dan LPPOM-MUI Sumbar..
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan



dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh penulis dari :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki

#### 4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku usaha di perusahaan yang memproduksi produk makanan yang disertifikasi halal LPPOM-MUI sedangkan yang menjadi sampel adalah beberapa perusahaan yang memiliki Auditor Halal Internal. Teknik penentuan sampel dalam hal ini adalah *snowball sampling* (sampel seperti bola salju/gelinding) yaitu peneliti berusaha mencari sampel sesuai kebutuhan yang diperlukan. Dalam hal ini yang menjadi sampel adalah AA Catering dan pelaku usaha Anabundo. Untuk informan dalam penelitian ini adalah LPPOM-MUI Sumbar.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, penelitian menggunakan teknik tertentu, untuk ini terlebih dahulu ditentukan jenis data apa yang akan dibutuhkan dalam hal mendukung penulisan. Ada dua data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti terhadap apa yang terjadi di lapangan, Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pengawasan yang dilakukan oleh AHI di Kota Padang. Data ini diperoleh dengan cara:
  - 1) Studi dokumen yakni mempelajari dokumen-dokumen yang erat berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>9)</sup>.



## 2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada informan dan responden sesuai dengan masalah yang diteliti. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari kehabisan pertanyaan<sup>10)</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi informan penulis yaitu pihak LPPOM-MUI SUMBAR beserta anggota-anggota yang memberikan informasi terkait dengan pokok penelitian yang penulis teliti dan akan mewawancarai informan secara langsung. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di perusahaan terkait penelitian yang penulis teliti, khususnya pihak AHI di perusahaan tersebut. Wawancara tersebut dilakukan secara tertulis melalui beberapa pertanyaan dalam kuisioner.

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi seluruh elemen masyarakat, yang mana dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>9)</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm.35

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm.50.



2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer antara lain: hasil-hasil penelitian, karya tulis dari kalangan praktisi hukum dan teori serta pendapat para sarjana.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan

Data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya diperlukan pengolahan sebagai pedoman untuk melakukan analisis. Pengolahan data tersebut dengan cara *editing*, yaitu melakukan pemeriksaan atau meneliti kembali terhadap data yang telah ada sehingga dapat diketahui dengan jelas mana data yang betul-betul relevan dan mengetahui mana data yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan untuk proses berikutnya.

### b. Analisis data

Setelah data diperoleh oleh penulis, maka data tersebut akan diolah dengan proses editing sehingga akan disusun secara sistematis. Selanjutnya, penulis melakukan analisis kualitatif suatu analisis yang digunakan tanpa mempergunakan angka-angka (tidak menggunakan rumus matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara *detail* mengenai permasalahan yang diteliti sehingga memperhatikan sifat penelitian yang deskriptif.

## F. Sistematika Penulisan



Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus pembahasan, maka sistematika penulisan ini akan tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II :TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang auditor halal internal, tinjauan umum tentang LPPOM-MUI serta sertifikasi halal, tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan pengaturannya, tinjauan umum tentang halal dan haram serta jaminan produk halal.

## **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang penulis angkat yaitu mengenai pelaksanaan pengawasan oleh auditor halal internal terhadap produk makanan yang telah disertifikasi halal oleh LPPOM-MUI Sumbar, mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Auditor Halal Internal berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Jaminan Produk Halal serta pertanggungjawaban pengawasannya kepada LPPOM-MUI Sumbar di Kota Padang.

## **BAB IV: PENUTUP**



Bab terakhir berisi tentang penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan dari apa yang penulis uraikan dan juga merupakan saran dari keseluruhan bab dalam tulisan ini.

